



BAB I PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi *responsibilitas managerial* pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.





A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Provinsi, sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 08 Tahun 2004 tanggal 10 Pebruari 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur. Tugas Pokok Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai pasal 63 adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang perkebunan.

B. Aspek Strategis Organisasi

Peran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diwujudkan dalam kebijakan pembangunan perkebunan Kalimantan Timur 5 (lima) tahun kedepan (2009 – 2013) yang diarahkan kepada upaya-upaya sebagai berikut :

- Peningkatan produksi dan produktivitas melalui pengembangan tanaman, peremajaan, rehabilitasi, diversifikasi dengan memperhatikan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, meningkatkan pelayanan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi.
- Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain SDM aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan, SDM petani dan tenaga kerja perkebunan dalam rangka penerapan teknologi, menumbuh kembangkan dukungan masyarakat terhadap pembangunan perkebunan dengan memperhatikan aspek kelembagaan untuk mendorong kemandirian usaha petani.

Beberapa hal yang dapat dikatagorikan sebagai kekuatan didalam penyelenggaraan tugas pembangunan adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999;
- Kondisi iklim, jenis tanah serta tersedianya potensi sumberdaya lahan yang relatif cukup luas yaitu seluas 5,3 juta hektar;
- Kebijakan pembangunan Kalimantan Timur diprioritaskan kepada 3 program utama, yaitu (1) pembangunan perkebunan 1 juta hektar kebun





kelapa sawit, (2) revitalisasi perkebunan dan (3) pembangunan perkebunan di daerah perbatasan.

- Faktor keamanan dan politis yang semakin kondusif.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

~ Tugas Pokok

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk kegiatan Dinas Tahun 2009. Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah membuat Rencana Strategik (RENSTRA) Tahun 2009 – 2013, Rencana Kinerja tahun 2009 yang sekaligus merupakan dasar dalam mengukur kinerja dalam penyusunan LAKIP.

~ Fungsi

Sesuai pasal 64 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan, sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- Penyusunan Perencanaan dan Program serta mengevaluasi hasil kegiatan dibidang perkebunan;
- Pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- Pembinaan dan koordinasi usaha perkebunan;
- Pembinaan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional.





**Tabel 1. TUPOKSI BAGIAN, BIDANG, UPTD LINGKUP DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TUGAS POKOK	FUNGSI
<p>1) SEKRETARIS</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan dan pengendalian program dan kegiatan b. Pembimbing kegiatan dan berbantuan c. Menyusun laporan tahunan d. Menyusun data statistik sumberdaya perkebunan e. Pengelola ruang data dan mengembangkan system kompetensi data f. Menyelenggarakan ketatalaksanaan kegiatan organisasi kantor, tata naskah dan perundang-undangan g. Mengelola pengadaan dan penyaluran barang inventaris h. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran rutin i. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka administrasi kepegawaian j. Membina disiplin pegawai k. Mensosialisasikan peraturan kepegawaian l. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran rutin m. Melaksanakan monitoring verifikasi pertanggungjawaban anggaran rutin n. Melakukan pengawasan terhadap penggajian o. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi Harga Satuan Umum (HSU) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data dan penyajian laporan tahunan perkebunan b. Pembinaan dan pengawasan dalam pengolahan data statistik sumberdaya perkebunan dan system kompetensi data c. Melaksanakan ketatalaksanaan kegiatan organisasi kantor, tata naskah dan perundang-undangan d. Pengawasan terhadap kebersihan dan keamanan kantor e. Membina dan memantau kegiatan pengelolaan surat menyurat f. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai g. Melakukan proses kegiatan penyusunan anggaran rutin h. Pengawasan verifikasi pertanggungjawaban anggaran rutin i. Pengawasan terhadap pengkajian
<p>2) BIDANG PENGEMBANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan petani dan pemanfaatan lahan b. Pemantauan dan perluasan areal tanaman perkebunan c. Penataan kelembagaan dan SDM petani d. Pemantauan sertifikasi tanah/ lahan untuk pembangunan perkebunan e. Pemantauan pemetaan tata letak perwilayahan komoditas dan lahan f. Penyusunan perencanaan pengembangan rehabilitasi, peremajaan dan perluasan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun petunjuk identifikasi penyiapan dan pemanfaatan lahan dalam bentuk CP/CL dan penyiapan lahan serta aspek-aspek pemanfaatannya b. Pemantauan dan pembinaan petani mengenai penyiapan dan pemanfaatan lahan c. Pemantauan sertifikasi tanah/lahan perkebunan dan penataannya





<p>g. Penyebarluasan dan pemantauan pengembangan diversifikasi tanaman perkebunan</p>	<p>d. Pembinaan dan penyelenggaraa pemetaan perwilayahan komoditas dan lahan</p> <p>e. Penyusunan rencana operasional kegiatan pengembangan studi kelayakan lahan</p> <p>f. Mengkompilasi data potensi lahan dan petani</p> <p>g. Menyusun petunjuk teknis pengembangan dan perluasan areal diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan</p> <p>h. Penyusunan perencanaan teknis pengembangan dan perluasan areal diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan</p> <p>i. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bidang pengembangan dan perluasan areal diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan</p> <p>j. Pembinaan dan penyiapan penyelenggaraan kelembagaan petani/penyuluh, diklat petani/pengembangan SDM petani dan petugas perkebunan</p>
<p>3) BIDANG USAHA (TANI)</p> <p>a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non-perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat</p> <p>b. Pemberian rekomendasi dalam pemberian izin usaha perkebunan</p> <p>c. Pemantauan dan pengawasan ijin Usaha Perkebunan</p> <p>d. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani</p> <p>e. Pemantauan dan evaluasi penanggulangan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan</p> <p>f. Pengawasan standard Unit Pengolahan, alat transportasi, Unit Penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan</p> <p>g. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil</p> <p>h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemasaran hasil perkebunan</p> <p>i. Promosi komoditas perkebunan</p> <p>j. Penyebarluasan informasi pasar</p>	<p>a. Melakukan proses rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan</p> <p>b. Pengumpulan data dan penyajian laporan perkembangan usaha perkebunan</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan dalam pemberian rekomendasi serta Ijin Usaha Perkebunan</p> <p>d. Mengembangkan sarana usaha perkebunan</p> <p>e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyelesaian hak guna usaha perkebunan</p> <p>f. Membina dan memantau tenaga kerja perkebunan</p> <p>g. Membina dan mengawasi permasalahan</p> <p>h. Melakukan bimbingan pengolahan pasca panen dan standarisasi mutu produk perkebunan</p> <p>i. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan</p> <p>j. Penyajian laporan informasi pasar</p>





<p>k. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan</p> <p>l. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha</p> <p>m. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan)penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan</p>	<p>k. Memantau dan mengevaluasi pemasaran hasil perkebunan</p> <p>l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas</p>
<p>4) BIDANG PRODUKSI</p> <p>a. Perencanaan dan pengadaan sumber benih bahan tanaman termasuk kebun induk dan kebun entrys</p> <p>b. Perencanaan penetapan sumber benih dan kebun induk regional</p> <p>c. Pemantauan peredaran dan sertifikasi benih</p> <p>d. Pengawasan unit-unit penangkar benih</p> <p>e. Penyiapan bahan tanaman bagi ijin perusahaan produksi dan peredaran benih komoditas strategis</p> <p>f. Penggunaan sarana produksi, pengolahan kesuburan tanah dan produktivitas tanah</p> <p>g. Pengawasan dan pembinaan penggunaan alat dan mesin perkebunan yang tepat guna</p> <p>h. Penyebaran informasi mengenai teknologi alat dan mesin perkebunan</p>	<p>a. Pemantauan dan evaluasi penggunaan kesediaan pupuk</p> <p>b. Pengawasan, pengadaan, peredaran, penggunaan dan standar mutu pupuk wilayah propinsi</p> <p>c. Identifikasi dan inventarisasi alat dan mesin serta penentuan kebutuhan pratipe alat dan mesin perkebunan</p> <p>d. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah propinsi</p> <p>e. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan dan teknis budidaya perkebunan</p> <p>f. Penyusuna kebijakan perkebunan antar lapangan (antar kabupaten) dan pengaturan penggunaan benih perkebunan</p> <p>g. Identifikasi dan pengembangan varietas unggulan lokal dan pemantauan benih impor wilayah propinsi Kalimantan Timur</p> <p>h. Pembangunan dan pengelolaan balai benih dan pengaturan penggunaan balai benih</p>
<p>5) BIDANG PERLINDUNGAN</p> <p>a. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan</p> <p>b. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan</p> <p>c. Membimbing dan memantau serta mengevaluasi pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan dan pengembangan sumber-sumber air tersebut</p> <p>d. Melaksanakan kebijakan penggunaan pestisida lingkup Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>e. Membina dan membimbing manajemen teknis mengenai pengamatan peramalan, pencegahan dan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman</p>	<p>a. Penyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi optimasi dan pengendalian lahan perkebunan</p> <p>b. Pengembangan , rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan</p> <p>c. Pembimbing dan pemantau serta pengevaluasi pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan dan pengembangan sumber-sumber air tersebut</p> <p>d. Pelaksanan kebijakan penggunaan pestisida lingkup Provinsi Kalimantan Timur</p>





<ul style="list-style-type: none">f. Menyebarkan informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya serta penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanamang. Operasional pengendalian dan bimbingan manajemen teknis mengenai konservasi tanah dan airh. Melaksanakan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan serta bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunani. Melakukan analisa mengenai dampak lingkunganj. Melakukan perlindungan kebun dari penjarahan dan okupasi lahank. Melakukan bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunanl. Penanganan gangguan usaha/konflik PBS dengan masyarakat sekitarnya	<ul style="list-style-type: none">e. Pembina dan pembimbing manajemen teknis mengenai pengamatan, peramalan, pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman/ fenomena iklim wilayah provinsif. Penyebar informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya serta penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanamang. Pelaksana operasional pengendalian dan bimbingan manajemen teknis mengenai konservasi tanah dan airh. Pelaksana studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan serta bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunani. Melakukan analisa mengenai dampak lingkunganj. Melakukan perlindungan kebun dari penjarahan dan okupasi lahank. Melakukan bimbingan perhitungan kehilangan hasil perkebunanl. Penanganan gangguan usaha/konflik PBS dengan masyarakat sekitarnya
<p>6) UPTD TEKNOLOGI TERAPAN PERKEBUNAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Membantu kepala dinas perkebunan provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengkajian teknologi terapan perkebunanb. Melaksanakan tugas-tugas berbantuan yang bersifat menunjang kegiatan pengkajian teknologi terapan perkebunanc. Menyelenggarakan identifikasi dan inventarisasi tanaman dalam rangka mendapatkan klon harapan tanaman perkebunand. Menyelenggarakan uji lapang/uji terap terhadap berbagai paket teknologi budidaya dari hasil kajian balai penelitiane. Menyelenggarakan uji galur kesesuaian berbagai komoditi induksi terhadap kondisi localf. Menyelenggarakan uji coba teknologi pengolahan hasil dalam rangka peningkatan mutu hasilg. Membangun kebun koleksi klon-klon unggulan perkebunanh. Menyelenggarakan rekayasa dan rancang bangun alat dan mesin pertanian yang sederhana	<ul style="list-style-type: none">a. Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD T2P mempunyai fungsi adalah melakukan uji lapang, uji terap dan uji coba berbagai paket teknologi baik teknologi pengolahan hasil maupun teknologi pasca panen





<ul style="list-style-type: none">i. Memfasilitasi hasil pengkajian dan penyebarluasan penerapan teknologi tepat guna untuk direkomendasikanj. Melaksanakan urusan ketatausahaan	
<p>7) UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Membantu kepala dinas perkebunan provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengkajian teknologi trepan perkebunanb. Menyelenggarakan uji laboratorium dan uji lapang pengendalian hama penyakit dan gulma/organisme pengganggu tumbuhan (OPT)c. Mengembangkan teknologi pengamatan dan pengendalian hama penyakit dan gulma/organisme pengganggu tumbuhan (OPT)d. Melaksanakan eksplorasi, identifikasi, inventarisasi dan pengembangan agensia hayatie. Mengembangkan dan melaksanakan uji penggunaan bio pestisidaf. Melakukan uji coba penentuan ambang toleransi dan kerugian hasil akibat serangan hama penyakit dan gulma/organism pengganggu tumbuhan (OPT)g. Melakukan uji lapang dalam rangka seleksi tanaman yang tahan terhadap hama penyakit dan gulma/organisme pengganggu Tumbuhan (OPT)h. Melakukan uji labolatorium dan uji lapang aplikasi pestisida kimiawi serta dampaknya terhadap agroekosistemi. Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi sejenisj. Menyiapkan dan menyebarkan bahan informasi teknologi tepat guna dibidang perlindungan tanamank. Menyelenggarakan uji system budidaya tanaman perkebunan yang spesifikasi lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap serangan hama penyakit dan gulma/organisme pengganggu tumbuhan (OPT)l. Melakukan pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida di wilayah Propinsi Kalimantan Timurm. Melakukan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisidan. Melakukan pengawasan standar mutu pestisida	<ul style="list-style-type: none">a. Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD P2TP mempunyai fungsi adalah melakukan berbagai uji labolatorium dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap serangan hama penyakit dan gulma/organism pengganggu tumbuhan (OPT)





<ul style="list-style-type: none">o. Melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim di wilayah provinsip. Melakukan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim di wilayah provinsiq. Melakukan pemantauan, peramalan, pengendalian, dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim di wilayah provinsir. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama penyakit menular tanaman di wilayah provinsis. Mengembangkan bahan tanaman bebas OPTt. Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihanu. Melaksanakan urusan ketatausahaan	
<p>8) UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Membantu kepala dinas perkebunan provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam bidang pengkajian teknologi terapan perkebunanb. Menyelenggarakan pengujian fisik mutu benihc. Menyelenggarakan pengujian mutu fisiologis dan mutu genetik benihd. Pengawasan mutu benih impor, benih antar area dan benih di dalam daerahe. Memberikan bimbingan teknis pengawasan benihf. Menyelenggarakan pemeriksaan terhadap kemurnian benih, vigoritas benih, daya kecambah, klon, varietas, kualitas benih dan kesehatan tanaman yang dihasilkang. Menyelenggarakan pemberian sertifikasi benihh. Pengawasan dan pembinaan terhadap sumber benih, penangkaran dan pembibitani. Pengawasan peredaran benihj. Pengawasan dan pembinaan terhadap sumber benih, penangkaran dan pembibitank. Melaksanakan urusan ketatausahaan	<ul style="list-style-type: none">a. Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD PBP mempunyai fungsi adalah melakukan berbagai pengujian mutu benih tanaman terhadap kemurnian benih, vigoritas benih, daya kecambah, klon, varietas, kualitas benih dan kesehatan tanaman yang dihasilkan

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah susunan **Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur** yang terdiri dari :





a. Susunan Kepegawaian

Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah terbentuk susunan kepegawaian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat :

- ◆ Sub. Bagian Perencanaan Program
- ◆ Sub. Bagian Umum
- ◆ Sub. Bagian Keuangan

c. Bidang- Bidang :

- ◆ Bid. Pengembangan
 - Sie. Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan
 - Sie. Pengembangan dan Perluasan areal
 - Sie. Penataan Kelembagaan dan SDM Petani
- ◆ Bid. Produksi
 - Sie. Bahan Tanaman
 - Sie. Budidaya Tanaman
 - Sie. Teknologi Alat dan Mesin
- ◆ Bid. Usaha
 - Sie. Administrasi Perijinan
 - Sie Pembinaan Usaha
 - Sie. Standarisasi Mutu dan Pemasaran produk
- ◆ Bid. Perlindungan
 - Sie. Sarana Perlindungan dan Perkebunan
 - Sie. Sarana Peramalan, Pengamatan, dan Pengendalian. OPT
 - Sie. Konservasi Tanah dan Air

d. UPTD :

- ◆ UPTD. Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)
 - Sie. Pengujian dan Sertifikasi Benih
 - Sie. Pengawasan dan Peredaran Benih
 - Sub. Bagian Tata Usaha
- ◆ UPTD. Teknologi Terapan Perkebunan (T2P)
 - Sie. Teknologi Terapan Tanaman Tahunan
 - Sie. Teknologi Terapan Tanaman Semusim
 - Sub. Bagian Tata Usaha





- ◆ UPTD. Pengemb. Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - Sie. Pengemb. Pengendalian Hama dan Gulma
 - Sie. Pengemb. Pengendalian Penyakit
 - Sub. Bagian Tata Usaha

E. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan susunan kepegawaian yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

1. Sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan timur terdiri dari:

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 124 Orang

■ Pendidikan S2	:	16 Orang
■ Pendidikan S1	:	42 Orang
■ Pendidikan DIII	:	5 Orang
■ Pendidikan DI	:	2 Orang
■ Pendidikan SLTA	:	38 Orang
■ Pendidikan SLTP	:	1 Orang

B. Calon Pegawai Negeri Sipil : 22 Orang

■ Pendidikan S1	:	10 Orang
■ Pendidikan SLTA	:	10 Orang
■ Pendidikan SLTP	:	2 Orang

C. Pegawai tidak tetap : 3 Orang

■ Pendidikan S1	:	1 Orang
■ Pendidikan SLTA	:	2 Orang

F. Sarana dan Prasarana Kantor

1. Kantor	:	4 Unit (Termasuk 3 UPTD)
2. Meja kerja	:	144 Buah
3. Kursi kerja	:	144 Buah
4. Kursi sofa	:	11 Buah
5. Lemari arsip	:	35 Buah





6. Filling Kabinet	:	22	Buah
7. Brankas	:	15	Buah
8. AC	:	34	Buah
9. Kipas Angin	:	5	Buah
10. Personal Computer	:	39	Buah
11. Ploter	:	2	Buah
12. Printer	:	39	Buah
13. Laptop	:	25	Buah
14. Kamera photo	:	5	Buah
15. Mesin tik	:	5	Buah
16. Alat lab	:	3	Set
17. Kendaraan roda dua	:	39	(APBD)
		161	(APBN)
18. Kendaraan Roda Empat :		5	(APBD)
		8	(APBN)
19. LCD	:	4	Buah





BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. Rencana Strategis

Dalam *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*, perencanaan stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Stratejik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disamping mengacu Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Propeda Kalimantan Timur juga mengacu pada arah kebijakan nasional pembangunan pertanian.

1. Visi

Terwujudnya perkebunan berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera (Competitiveness, Community Approach and Sustainability)

2. Misi

Adapun misi dari Renstra Perkebunan adalah :

1. Mengawal perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan secara akurat dan komprehensif; (Comprehensiveness planning)
2. Meningkatkan pengembangan dan perluasan perkebunan dengan pemberdayaan masyarakat; (Development, Extensibility and Empowerment)
3. Memfasilitasi revitalisasi usaha perkebunan yang berdaya saing (Competitiveness);
4. Memfasilitasi peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan (Productivity);
5. Mengawal pembangunan perkebunan yg aman, produktif dan berkelanjutan (Sustainability);
6. Mengembangkan sistem pelayanan, pengawalan dan pengawasan peredaran benih perkebunan (System approach);
7. Mengembangkan sistem pelayanan dan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan (Technology implementation);
8. Mengembangkan sistem pelayanan, penerapan teknologi budidaya dan pengolahan hasil perkebunan (Processing Technology Development)





Tabel 2. Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Sekretariat / Bidang / UPTD

1) SEKRETARIAT

- Misi : 1) Mengawal perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan secara akurat dan komprehensif
 2) Reformasi Birokrasi dengan pendekatan system dalam bekerja

TUJUAN	SASARAN
1. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan yang berkelanjutan	1. Terpadunya sistem anggaran pembangunan perkebunan meliputi APBN, APBD Provinsi dan Kab/Kota 2. Tercapainya target dan realisasi penyerapan keuangan secara seimbang dan tepat waktu
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM aparatur untuk mengoptimalkan kinerja	1. Tercapainya penyelesaian tugas secara benar dan tepat waktu; 2. Terbangunnya komitmen dan motivasi kinerja sdm aparatur
SASARAN	STRATEGI
1. Terpadunya sistem anggaran pembangunan perkebunan meliputi APBN, APBD Provinsi dan Kab/ Kota	1. Memacu peluang kerja sama dengan pihak terkait; 2. Mengoptimalkan sistem informasi database pembangunan perkebunan
2. Tercapainya target dan realisasi penyerapan keuangan secara seimbang dan tepat waktu	1. Memacu kinerja seluruh satuan kerja sebagai penanggung jawab kegiatan; 2. Meningkatkan fungsi kontrol penanggung jawab kegiatan/program terhadap penggunaan anggaran.
3. Tercapainya penyelesaian tugas secara benar dan tepat waktu	1. Meningkatkan motivasi kinerja aparatur. 2. Menerapkan peraturan secara konsisten terhadap kinerja aparatur.
4. Terbangunnya komitmen dan motivasi kinerja sdm aparatur	1. Membangun karakter sumber daya aparatur. 2. Menciptakan harmonisasi hubungan kerja antar aparatur.





2) BIDANG PENGEMBANGAN

Misi : Meningkatkan pengembangan dan perluasan perkebunan dengan pemberdayaan masyarakat

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan produktivitas lahan melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi perkebunan rakyat	1. Terbangunnya kawasan perkebunan rakyat dalam skala ekonomis yang dapat menjadi penggerak ekonomi disekitarnya , kelapa sawit 342.000 ha, kakao 4.000 ha, aneka tanaman 3.999 ha 2. Terwujudnya produktivitas lahan melalui kegiatan rehabilitasi dan peremajaan kelapa sawit seluas 8.000 ha, kelapa dalam seluas 5.000 ha, karet 25.000 ha, kakao 11.000 ha dan lada 10.800 ha
2. Meningkatkan SDM petugas dan petani serta memberdayakan kelembagaan	1. Meningkatnya SDM petugas dan petani sebanyak 15.000 orang dan kemandirian kel. tani setiap kab/kota sebanyak 500 kel. tani 2. Berkembangnya kelembagaan kelompok tani hingga berbadan hukum koperasi di 5 Kab./Kota
SASARAN	STRATEGI
1. Terbangunnya kawasan perkebunan rakyat dalam skala ekonomis yang dapat menjadi penggerak ekonomi disekitarnya , kelapa sawit 342.000 ha, kakao 4.000 ha, aneka tanaman 3.999 ha	1. Melaksanakan survey dan identifikasi lahan dan petani yang potensial untuk kawasan kelapa sawit, karet, kakao dan ha aren 2. Menumbuhkan jejaring kerja antara pemerintah, swasta dan masyarakat 3. Meningkatkan pengembangan areal perkebunan sesuai dengan penyesuaian RTRW (penambahan KBNK seluas 1,3 juta ha) dengan pola kemitraan, PBS, PIR swadaya dan lain-lain
2. Terwujudnya produktivitas lahan melalui kegiatan rehabilitasi dan peremajaan kelapa sawit seluas 8.000 ha, kelapa dalam seluas 5.000 ha, karet 25.000 ha, kakao 11.000 ha dan lada 10.800 ha	1. Pendataan perkebunan rakyat yang sudah tua yang perlu direhabilitasi pada komoditi kelapa sawit, karet dan kakao 2. Melaksanakan pemantapan kelayakan kebun-kebun yang akan direhabilitasi
3. Meningkatnya SDM petugas dan petani sebanyak 15.000 orang dan kemandirian kel. tani setiap kab/kota sebanyak 500 kel. tani	1. Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan pelatihan petugas pembina dan petani





	2. Memantapkan petugas pembina dan petani untuk mengikuti kegiatan pelatihan
4. Berkembangnya kelembagaan kelompok tani hingga berbadan hukum koperasi di 5 Kab./Kota	1. Mengembangkan jejaring usaha (net working) antar kelompok tani dalam wadah kebersamaan ekonomi 2. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan kelompok tani hingga berbadan hukum

3) BIDANG PERLINTAN

Misi : Mengawal pembangunan perkebunan yg aman, produktif, dan berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN
1. Membangun perkebunan yang aman, produktif serta berkelanjutan	1. Meningkatkan SDM petani 1.000 orang dan pemandu lapang 40 orang dalam penerapan sistem pengendalian hama secara terpadu dan berkesinambungan 2. Mengurangi tingkat kerugian hasil akibat adanya serangan OPT sampai dengan 20 persen setiap tahun 3. Pembangunan perkebunan yang berkelanjutan
2. Menciptakan sistem peringatan dini terhadap serangan OPT, kerusakan lingkungan dan gangguan usaha perkebunan secara terpadu	1. Menumbuhkembangkan jejaring kerja di Kab/Kota 2. Meminimalisir terjadinya gangguan usaha dan kerusakan lingkungan perkebunan
SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatkan SDM petani 1.000 orang dan pemandu lapang 40 orang dalam penerapan sistem pengendalian hama secara terpadu dan berkesinambungan	1. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan petani murni, mengevaluasi petani tindak lanjut dan rekrutmen pemandu lapang 2. Melaksanakan kegiatan pelatihan SL-PHT petani murni, petani tindak lanjut dan pemandu lapang
2. Mengurangi tingkat kerugian hasil akibat adanya serangan OPT sampai dengan 20 persen setiap tahun	1. Mengoptimalkan penerapan sistem pengendalian hama terpadu 2. Membangun sistem informasi pengamatan OPT dan sarana perlindungan tanaman
3. Pembangunan perkebunan yang berkelanjutan	1. Penerapan AMDAL : UKL/UPL 2. RSPO 3. Pembukaan Lahan Tanpa bakar





4. Menumbuhkembangkan jejaring kerja di Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengawalan terhadap proses penyelesaian gangguan usaha dan lingkungan Membangun sistem penanggulangan krisis gangguan usaha, lingkungan dan OPT
5. Meminimalisir terjadinya gangguan usaha dan kerusakan lingkungan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan penerapan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh stake holder Menginventarisir permasalahan dan memfasilitasi proses penyelesaian gangguan usaha dan kerusakan lingkungan

4) BIDANG PRODUKSI

Misi : Memfasilitasi peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan

TUJUAN	SASARAN
1. Mengoptimalkan penggunaan bahan tanaman yang bermutu	<ol style="list-style-type: none"> Diperolehnya inventarisasi, identifikasi bahan tanaman perkebunan Memfasilitasi ketersediaan kebutuhan bahan tanaman 5 (lima) komoditi unggulan perkebunan sebanyak 45.000.000 bibit diluar PBS dan PBN
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya sistem budidaya perkebunan sesuai dengan baku teknis di kab/kota Meningkatnya penggunaan sarana produksi dan alat mesin perkebunan sebesar 20 % pertahun
SASARAN	STRATEGI
1. Diperolehnya inventarisasi, identifikasi bahan tanaman perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan kegiatan pokja plasma nutfah Mengevaluasi potensi pengembangan plasma nutfah
2. Memfasilitasi ketersediaan kebutuhan bahan tanaman 5 (lima) komoditi unggulan perkebunan sebanyak 45.000.000 bibit diluar PBS dan PBN	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerjasama dengan sumber benih dan menetapkan kebun koleksi, Blok Penghasil Tinggi, kebun induk plasma nutfah Mensosialisasikan pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah unggulan kepada masyarakat
3. Terlaksananya sistem budidaya perkebunan sesuai dengan baku teknis di kab/kota	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan ketrampilan petani pekebun dalam teknis budidaya (5 komoditi unggulan) melalui bimbingan teknis budidaya perkebun Mengoptimalkan peran serta





	masyarakat dalam melaksanakan budidaya perkebunan
4. Meningkatnya penggunaan sarana produksi dan alat mesin perkebunan sebesar 20 % pertahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan petani pekebun dalam penggunaan alat mesin perkebunan (kelapa dalam, kakao dan lada) 2. Bimbingan operasional pemanfaatan alat mesin perkebunan untuk 4 Unit Pelayanan Jasa Alat mesin (kelapa, kakao, karet dan lada)

5) BIDANG USAHA TANI

Misi : Memfasilitasi revitalisasi usaha perkebunan yang berdaya saing

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatnya pelaksanaan revitalisasi perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pembangunan kebun pola Kemitraan usaha PBS dengan koperasi perkebunan rakyat (203.684 ha, PBS aktif bermitra dengan Koperasi) 2. Meningkatnya pembangunan kebun pola non mitra 39.016 ha
2. Meningkatkan iklim investasi , daya saing dan pemasaran produk perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kelas kebun Perkebunan Besar (25% kebun PBS aktif berklas I, 50% klas 2) 2. Meningkatnya mutu hasil olahan perkebunan sesuai standart (75% kakao fermented, 75 % lada putih, 75 % SIR karet) dan volume perdagangan antar pulau serta ekspor produk perkebunan
SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya pembangunan kebun pola Kemitraan usaha PBS dengan koperasi perkebunan rakyat (203.684 ha PBS aktif bermitra dengan Koperasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan institusi/lembaga terkait melalui Tim kerja (Panitia B) 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja perijinan perkebunan 3. Memfasilitasi penyusunan rencana makro perkebunan yang terintegrasi
2. Meningkatnya pembangunan kebun pola non mitra 39.016 ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian klasifikasi kebun secara konsisten dan berkesinambungan 2. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi perkebunan besar 3. Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kemajuan usaha PBS





<p>3. Meningkatnya kelas kebun Perkebunan Besar (25% kebun PBS aktif berklas I, 50% klas 2)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Fungsi Tim Pembina Dan Tim Kerja Pengawasan Revitalisasi Perkebunan 2. Mengoptimalkan Koordinasi Dan Komunikasi Dengan Asosiasi Perkebunan 3. Melakukan Sosialisasi Dan Pengawasan Pelaksanaan Perda Kemitraan
<p>4. Meningkatnya mutu hasil olahan perkebunan sesuai standart (75% kakao fermented, 75 % lada putih, 75 % SIR karet) dan volume perdagangan antar pulau serta ekspor produk perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyediaan UPH perkebunan dan peralatan pasca panen 2. Mengoptimalkan pemanfaatan UPH perkebunan yang telah tersedia 3. Peningkatan SDM petani dan petugas melalui pelatihan teknis dan manajemen

6) UPTD PENGAWAS BENIH PERKEBUNAN (PBP)

Misi : Mengembangkan sistem pelayanan, pengawasan dan pengawasan peredaran benih perkebunan

TUJUAN	SASARAN
<p>1. Menciptakan system pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat dalam pengawasan penggunaan benih</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan penggunaan benih bermutu sesuai prosedur tetap sebanyak 80 persen 2. Terwujudnya pengawasan, ketersediaan benih bermutu dan bersertifikat di masyarakat
<p>2. Diperolehnya benih unggul bermutu untuk penyediaan pengembangan pembangunan perkebunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terawasinya sebanyak 80 persen ketersediaan benih yang dihasilkan oleh sumber benih, penangkar benih dan pengedar benih 2. Meminimalisir penggunaan benih iligitim, benih asalan, benih tidak bermutu yang digunakan sebagai bahan tanaman dalam pembangunan perkebunan sebanyak 20 persen pertahun
SASARAN	STRATEGI
<p>1. Terwujudnya pelayanan penggunaan benih bermutu sesuai prosedur tetap sebanyak 80 persen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan, meningkatkan, SDM perbenihan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam pelayanan penggunaan benih bermutu 2. Meningkatkan jejaring kerja antara sumber benih, pengawas benih, penangkar benih, pengedar benih dan





	masyarakat pengguna benih di tingkat kab/kota, provinsi, regional, nasional
2. Terwujudnya pengawasan, ketersediaan benih bermutu dan bersertifikat di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan dan pengawasan peredaran dalam proses sertifikasi mutu benih dan pelabelan benih 2. Meningkatkan kinerja dan koordinasi pengawasan peredaran benih antar pengawas benih perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
3. Terawasinya sebanyak 80 persen ketersediaan benih yang dihasilkan oleh sumber benih, penangkar benih dan pengedar benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan benih bersertifikat dan berlabel melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran mutu benih
4. Meminimalisir penggunaan benih ilegal, benih asalan, benih tidak bermutu yang digunakan sebagai bahan tanaman dalam pembangunan perkebunan sebanyak 20 persen pertahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah peredaran benih ilegal melalui kegiatan sosialisasi peraturan perbenihan ditingkat provinsi, kab/kota 2. Melaksanakan pembinaan kepada produsen penangkar, pengedar dan pengguna benih bina

7) UPTD : PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN (P3P)

Misi : Mengembangkan sistem pelayanan dan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan kualitas SDM dibidang perlindungan tanaman perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlatihnya petugas perlindungan tanaman perkebunan sebanyak 7 orang pertahun 2. Terlaksananya pertemuan penyegaran petugas pengamat OPT satu kali dalam setahun
2. Meningkatkan penerapan teknologi pengendalian OPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan uji terap tehnologi penerapan OPT sebanyak 4 paket/Tahun 2. Terlaksananya upaya pencegahan serangan OPT
SASARAN	STRATEGI
1. Terlatihnya petugas perlindungan tanaman perkebunan sebanyak 7 orang pertahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi SDM Pelaksana teknologi perlintan bun 2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki





2. Terlaksananya pertemuan penyegaran petugas pengamat OPT satu kali dalam setahun	1. Meningkatkan koordinasi dengan petugas pengamat OPT 2. Menyelaraskan kegiatan perlintan bun
3. Melaksanakan uji terap teknologi penerapan OPT sebanyak 4 paket / Tahun	1. Menginventarisir dan identifikasi permasalahan OPT spesifik lokasi 2. Menerapkan teknologi hasil kajian OPT spesifik lokasi
4. Terlaksananya upaya pencegahan serangan OPT sebanyak 3 paket	1. Meningkatkan pemahaman tentang penggunaan agensia hayati dan pestisida nabati 2. Memberikan pelayanan kepada petani yang memerlukan informasi penerapan teknologi dan pengendalian OPT

8) UPTD : PENGKAJIAN TEKNOLOGI TERAPAN PERKEBUNAN (PT2P)

Misi : Mengembangkan sistem pelayanan, penerapan teknologi budidaya dan pengolahan hasil perkebunan

TUJUAN	SASARAN
1. Menerapkan teknologi budidaya perkebunan	1. Tersosialisasinya penerapan teknologi budidaya terhadap 350 orang petani dan petugas teknis di Kab/Kota 2. Tercapainya penerapan teknologi budidaya perkebunan di tingkat petani sebesar 30 persen
2. Menerapkan teknologi pengolahan hasil perkebunan	1. Terlaksananya penerapan teknologi pengolahan hasil terhadap 5 (lima) komoditas unggulan 2. Terwujudnya penganeekaragaman produk turunan 5 (lima) komoditas unggulan
SASARAN	STRATEGI
1. Tersosialisasinya penerapan teknologi budidaya terhadap 350 orang petani dan petugas teknis di Kab/Kota	1. Melakukan pendampingan dan pengawalan dalam penerapan teknologi budidaya perkebunan 2. Mengikutsertakan dan melaksanakan pelatihan
2. Tercapainya penerapan teknologi budidaya perkebunan di tingkat petani sebesar 30 persen	1. Melaksanakan demplot dan menyebarluaskan informasi dalam bentuk booklet, leaflet, brosur, CD dan media elektronik lainnya





	2. Melakukan evaluasi penerapan teknologi dan konsultasi ke Balai-balai Penelitian/Puslit
3. Terlaksananya penerapan teknologi pengolahan hasil terhadap 5 (lima) komoditas unggulan	1. Mendorong peningkatan kualitas produk perkebunan sesuai standar SNI 2. Melakukan pengawalan dan mediasi antara sumber dan pengguna teknologi pengolahan hasil perkebunan
4. Terwujudnya penganekaragaman produk turunan 5 (lima) komoditas unggulan	1. Melakukan rekayasa teknologi hasil agar lebih berkembang di masy. 2. Penerapan teknologi baru dan spesifik lokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat



3. Tujuan

Tujuan sebagai implementasi atau penjabaran dari misi, merupakan suatu yang akan dicapai, dapat dirumuskan Tujuan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan yang berkelanjutan;
- Meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM aparatur untuk mengoptimalkan kinerja;
- Meningkatkan produktivitas lahan melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi perkebunan rakyat;
- Meningkatkan SDM petugas dan petani serta memberdayakan kelembagaan;
- Membangun perkebunan yang aman, produktif serta berkelanjutan;
- Menciptakan sistem peingatan dini terhadap serangan OPT, kerusakan lingkungan dan gangguan usaha perkebunan secara terpadu;
- Mengotimalkan penggunaan bahan tanaman yang bermutu;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perkebunan;
- Meningkatkan pelaksanaan revitalisasi perkebunan;
- Meningkatkan iklim investasi, daya saing dan pemasaran produk perkebunan;
- Menciptakan sistem pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan akurat dalam pengawalan penggunaan benih;
- Diperolehnya benih unggul bermutu untuk penyediaan pengembangan pembangunan perkebunan;
- Meningkatkan kualitas SDM dibidang perlindungan tanaman perkebunan;
- Meningkatkan penerapan teknologi pengendalian OPT;
- Menerapkan teknologi budidaya perkebunan;
- Menerapkan teknologi pengolahan hasil perkebunan;

4. Sasaran

Dalam upaya untuk mencapai tujuan, maka sasaran yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut :

- ✚ Terpadunya sistem anggaran pembangunan perkebunan meliputi APBN, APBD Provinsi dan Kab/Kota
- ✚ Tercapainya target dan realisasi penyerapan keuangan secara seimbang dan tepat waktu;





- ✚ Tercapainya penyelesaian tugas secara benar dan tepat waktu;
- ✚ Terbangunnya komitmen dan motivasi kinerja sdm aparatur;
- ✚ Terbangunnya kawasan perkebunan rakyat dalam skala ekonomis yang dapat menjadi penggerak ekonomi disekitarnya , kelapa sawit 342.000 ha, kakao 4.000 ha, aneka tanaman 3.999 ha;
- ✚ Terwujudnya produktivitas lahan melalui kegiatan rehabilitasi dan peremajaan kelapa sawit seluas 8.000 ha, kelapa dalam seluas 5.000 ha, karet 25.000 ha, kakao 11.000 ha dan lada 10.800 ha;
- ✚ Meningkatnya SDM petugas dan petani sebanyak 15.000 orang dan kemandirian kel. tani setiap kab/kota sebanyak 500 kel. Tani;
- ✚ Berkembangnya kelembagaan kelompok tani hingga berbadan hukum koperasi di 5 Kab./Kota;
- ✚ Meningkatkan SDM petani 1.000 orang dan pemandu lapang 40 orang dalam penerapan sistem pengendalian hama secara terpadu dan berkesinambungan;
- ✚ Mengurangi tingkat kerugian hasil akibat adanya serangan OPT sampai dengan 20 persen setiap tahun;
- ✚ Pembangunan perkebunan yang berkelanjutan;
- ✚ Menumbuhkembangkan jejaring kerja di Kab/Kota;
- ✚ Meminimalisir terjadinya gangguan usaha dan kerusakan lingkungan perkebunan;
- ✚ Diperolehnya inventarisasi, identifikasi bahan tanaman perkebunan;
- ✚ Memfasilitasi ketersediaan kebutuhan bahan tanaman 5 (lima) komoditi unggulan perkebunan sebanyak 45.000.000 bibit diluar PBS dan PBN;
- ✚ Terlaksananya sistem budidaya perkebunan sesuai dengan baku teknis di kab/kota;
- ✚ Meningkatnya penggunaan sarana produksi dan alat mesin perkebunan sebesar 20 % pertahun;
- ✚ Meningkatnya pembangunan kebun pola Kemitraan usaha PBS dengan koperasi perkebunan rakyat (203.684 ha, PBS aktif bermitra dengan Koperasi);
- ✚ Meningkatnya pembangunan kebun pola non mitra 39.016 ha;
- ✚ Meningkatnya kelas kebun Perkebunan Besar (25% kebun PBS aktif berklas I, 50% klas 2);





- ✚ Meningkatkan mutu hasil olahan perkebunan sesuai standar (75% kakao fermented, 75 % lada putih, 75 % SIR karet) dan volume perdagangan antar pulau serta ekspor produk perkebunan;
- ✚ Terwujudnya pelayanan penggunaan benih bermutu sesuai prosedur tetap sebanyak 80 persen;
- ✚ Terwujudnya pengawasan, ketersediaan benih bermutu dan bersertifikat di masyarakat;
- ✚ Terawasinya sebanyak 80 persen ketersediaan benih yang dihasilkan oleh sumber benih, penangkar benih dan pengedar benih;
- ✚ Meminimalisir penggunaan benih iligitim, benih asalan, benih tidak bermutu yang digunakan sebagai bahan tanaman dalam pembangunan perkebunan sebanyak 20 persen pertahun;
- ✚ Terlatihnya petugas perlindungan tanaman perkebunan sebanyak 7 orang pertahun;
- ✚ Terlaksananya pertemuan penyegaran petugas pengamat OPT satu kali dalam setahun;
- ✚ Melaksanakan uji terap tehnologi penerapan OPT sebanyak 4 paket/Tahun;
- ✚ Terlaksananya upaya pencegahan serangan OPT;
- ✚ Tersosialisasinya penerapan teknologi budidaya terhadap 350 orang petani dan petugas teknis di Kab/Kota;
- ✚ Tercapainya penerapan teknologi budidaya perkebunan di tingkat petani sebesar 30 persen;
- ✚ Terlaksananya penerapan teknologi pengolahan hasil terhadap 5 (lima) komoditas unggulan;
- ✚ Terwujudnya penganekaragaman produk turunan 5 (lima) komoditas unggulan;

5. Indikator Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 060/K.430/2009 tanggal 4 Agustus 2009 maka telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi :





Tabel : Indikator Kinerja Utama Provinsi Sektor Perkebunan Tahun 2010

Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan luasan lahan perkebunan	1. Produksi perkebunan : - Kelapa sawit. - Kakao - Karet	Ton Ton Ton	2.853.294 13.985 24.199
	2. Peningkatan perluasan areal kelapa sawit - Kelapa sawit. - Kakao - Karet	Ha Ha Ha	900 100 200





Penetapan Kinerja Tahun 2010

Kebijakan pembangunan perkebunan Kalimantan Timur tahun 2009 - 2013 diarahkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- Memberikan dukungan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan perkebunan;
- Mengembangkan profesionalisme petugas dan pekebun melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- Membangun dukungan masyarakat dan memfasilitasi terbinanya hubungan yang sinergi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan;
- Mengembangkan kegiatan pengkajian dan rakitan teknologi sesuai dengan kondisi daerah.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka pembangunan perkebunan Kalimantan Timur kurun waktu lima tahun kedepan akan dilaksanakan dengan mensinergikan program utama pembangunan pertanian nasional yaitu Program Pembangunan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan program prioritas pembangunan Kalimantan Timur.

Program pembangunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan);
- Program Pengembangan Agribisnis;
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
- Program Peningkatan Kesejahteraan Perkebunan;
- Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.





Tabel : Penetapan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010

No.	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran (Outcome)	Target	Program	Anggaran	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tercapainya target dan realisasi penyerapan keuangan secara seimbang dan tepat waktu	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.923.668.900 7.725.179.900 327.450.000 451.356.000 267.190.000 2.261.857.402 513.600.000	
2.	Terbangunnya kawasan perkebunan rakyat dalam skala ekonomis yg dapat menjadi penggerak ekonomi disekitarnya	Terdapatnya data CP/CL untuk perluasan areal tanaman kelapa sawit Terdapatnya data CP/CL untuk perluasan areal tanaman karet Terdapatnya data CP/CL untuk perluasan tanaman kakao Terdapatnya data CP/CL untuk perluasan areal tanaman kelapa dalam	1000 ha/ 561 petani 300 ha/ 257 petani 100 ha / 89 petani		9.102.738.600,-	





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ~ 2010

3.	Meningkatkan SDM petani dan pemandu lapang dalam penerapan PHT	Meningkatnya SDM petani dalam bidang pengendalian OPT kelapa sawit yg tepat guna	200 org	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	1.105.306.000,-	
		Menurunnya gangguan OPT tanaman perkebunan setelah diadakan pengendalian dilapangan	6 Kab/ Kota			
		Meningkatnya SDM petani kakao dan petugas untuk pengendalian OPT kakao pada sentra-sentra perkebunan kakao di Kab. Nunukan, Malinau, Berau, Kutim, Bulungan dan Samarinda	14 Kab/ Kota			
4.	1. Mengurangi tingkat kerugian hasil akibat adanya serangan OPT 2. Memfasilitasi ketersediaan kebutuhan bahan tanaman komoditi unggulan perkebunan dan meningkatnya penggunaan sarana produksi dan alat mesin perkebunan	Terlaksananya pengendalian OPT penting pada tanaman perkebunan	14 kab/ Kota	Program peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1.311.302.198.-	
		1. Peserta waralaba Kab/Kota 2. Terlatihnya petugas dan pengelola alsin di Kab/Kota	2 Kab/ Kota 30 orang			
5.	Meningkatnya pembangunan kebun pola kemitraan usaha PBS dg koperasi dan pola non mitra	Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan institusi lembaga terkait melalui Tim Kerja	13 Kab/ Kota	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/Perkebunan)	117.085.000,-	
6.	Meningkatnya kelas kebun PBS dan mutu hasil olahan perkebunan sesuai standar	Melakukan penilaian klasifikasi kebun secara konsisten dan berkesinambungan. Mengoptimalkan pemanfaatan yg telah tersedia	13 Kab/ Kota			





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ~ 2010

7.	Terawasinya ketersediaan benih yg dihasil kan sumber benih	Terawasinya peredaran benih bina perkebunan	10 Kab/ Kota (30 org)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	548.268.000,-	
8.	Melaksanakan uji terap teknologi dan uji penerapan OPT	Terlaksananya uji efektifitas jamur trichoderma sp sebagai agensi pengendali hayati		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	679.468.000,-	
9.	Melaksanakan pemeliharaan kelapa induk kopyor, aren dan lada serta pengembangan kebun induk aren	Terpeliharanya kelapa induk kopyor, aren dan lada		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	968.700.000	





BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja, evaluasi kinerja dilakukan setelah tahapan penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian kinerja. Evaluasi kinerja diartikan sebagai suatu proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya produktivitas dimasa mendatang.

Sedangkan tujuan dari evaluasi kinerja adalah agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan penetapan indikator pada setiap kegiatan yang terdiri dari :

- Inputs (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs;
- Outputs (keluaran) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan atau non fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- Outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya outputs kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;

Penerapan indikator kegiatan untuk pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Secara umum kinerja setiap indikator, kegiatan, program dan kebijaksanaan berhasil, walaupun memang ada beberapa yang belum mencapai hasil yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diukur dan dianalisa dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (analisis formulir PKK) yang mencakup hal sebagai berikut :





- Indikator inputs menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi (sangat berhasil), hal ini terlihat karena target dengan prosentase maksimal yaitu 100 % dengan tingkat capaian (realisasi) prosentasenya minimal, dikarenakan adanya penghematan dari segi keuangan. Prosentase tingkat capaian pada indikator inputs secara keseluruhan rata-rata 87,62 %.
- Indikator outputs menunjukkan hasil yang memuaskan, hal ini ditandai realisasi outputs setiap kegiatan maksimal dengan prosentase capaian keseluruhan rata-rata capaian 91,78 %. Hal ini menunjukkan kegiatan yang direncanakan pada umumnya seluruhnya terlaksana dengan baik;
- Indikator outcomes menunjukkan hasil memuaskan walaupun memang ada beberapa outcomes yang belum dapat diukur, hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan baru dimulai sehingga outcomes baru dapat diukur setelah kegiatan berjalan hingga 3 - 5 tahun kedepan, namun demikian secara keseluruhan prosentase realisasi capaian kegiatan sebesar 90,12 %;

Berdasarkan analisis indikator tersebut diatas dengan prosentase hasil capaian pada rentang 87 – 92 %, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat penghematan dalam penggunaan dana, walaupun memang ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan masalah waktu dan beberapa kegiatan yang sama namun prosentasenya sangat kecil;
- Pada umumnya untuk kegiatan penanaman, rehabilitasi, intensifikasi, diversifikasi dan pemeliharaan kebun, indikator outcomes belum dapat diukur kinerjanya karena tanaman belum menghasilkan kecuali yang dapat diukur dari peningkatan luas areal perkebunan. Untuk lebih lengkapnya, pengukuran kinerja dapat dilihat pada lampiran Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan

Tabel 3. Realisasi Kinerja Kegiatan Disbun Prov. Kaltim

<i>Program</i>	<i>Indikator Kinerja</i>	<i>%</i>
1. Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	1. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan.	94,80
	2. Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah perkebunan.	98,69
	3. Pengembangan informasi permintaan pasar hasil produksi pertanian perkebunan masyarakat.	87,10
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	1. Identifikasi Blom Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RDKK Pupuk dan Inventarisasi Plasma Nutfah.	73,11





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ~ 2010

	2. Pengembangan dan operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat.	93,78
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan	1. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan.	50,00
	2. Pemberdayaan dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan.	97,06
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan mutu produk perkebunan	96,11
	2. Pengembangan perbenihan / pembibitan	100
	3. Penyusunan Data base potensi produksi pangan <ul style="list-style-type: none">- Rakorbun 2010- Rakornis semester I dan II- Penyusunan Rencana Kerja / Program Kegiatan- Monitoring, pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyusunan statistik perkebunan.- Workshop dan sinkronisasi data SIG perkebunan Kab/Kota- Satuan Tugas pemetaan Disbun Prov. Kaltim	96,12
	4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan : <ul style="list-style-type: none">- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan DK/TP- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Perkebunan- Workshop Simonev Perkebunan 2010	100,00
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	1. Uji bahan pengendali penyakit, hama dan patogen pada tanaman perkebunan	89,47
	2. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian perkebunan tepat guna	62,53





B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tabel 4. Target dan Realisasi Tahun Ini

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Ket.
			Keuangan (Rp.)	Fisik (%)	
I.	APBN				
1.	Satker Disbun Prov. Kaltim (05) DK	3.082.340.000	2.285.094.000	81,24	
2.	Satker Disbun Prov. Kaltim (05) TP	1.181.180.000	519.979.200	50,11	
3.	Satker Disbun Malinau (05)	788.790.000	778.585.000	100	
4.	Satker Distan Kutai Barat (05)	612.090.000	563.840.000	96,24	
	JUMLAH Satker (05)	5.664.400.000	4.147.498.200	75,12	
5.	Satker Disbun Prov. Kaltim (07)	505.000.000	396.485.925	88,96	
	JUMLAH Satker (07)	505.000.000	398.485.925	88,96	
6.	Satker Disbun Prov. Kaltim DK(08)	450.000.000	437.580.600	98,96	
	Satker Disbun Prov. Kaltim TP(08)	520.000.000	520.000.000	100	
7.	Satker Dishutbuntam PPU (08)	320.000.000	310.970.000	100	
8.	Satker Disbun Nunukan (08)	210.000.000	197.350.000	100	
	JUMLAH Satker (08)	1.500.000.000	1.465.900.600	99,69	
9.	Satker Gernas Kakao Disbun Prov. Kaltim	5.470.717.000	5.074.127.515	94,64	
10.	Satekr Gernas Kakao Disbun Berau	689.890.000	497.350.050	100	
11.	Satker Gernas Kakao Disbun Malinau	636.040.000	594.374.000	98,45	
12.	Satker Gernas Kakao Disbun Nunukan	742.540.000	614.614.625	92,25	
	JUMLAH Satker Gernas Kakao	7.539.187.000	6.780.466.190	95,22	
	Jumlah	15.208.587.000	12.790.350.915	89,40	
II.	APBD				
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	5.013.744.402	4.250.607.937	97,41	
2.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	753.611.000	609.773.500	93,83	
3.	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	9.928.161.498	9.016.574.405	92,29	
4.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan	849.353.300	512.342.225	76,91	
5.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	2.494.998.000	1.564.841.715	69,87	
6.	Belanja Rutin	1.332.822.400	1.073.777.244	88,90	
7.	Belanja Tidak Langsung Rutin	10.799.806.000	9.132.440.611	8030	
8.	Belanja Langsung	10.309.692.400	8.969.748.165	88,16	
	Jumlah	41.449.189.000	35.030.105.802	88,00	
	TOTAL	56.657.776.000	47.820.456.717	88,30	



Tabel 5. Realisasi tahun ini dan tahun lalu

No.	Kegiatan	Realisasi (Rp.)		Ket.
		2009	2010	
I. APBN				
1.	JUMLAH Satker (05)	3.780.634.248	4.263.520.000	
2.	JUMLAH Satker (07)	447.783.810	505.000.000	
3.	JUMLAH Satker (08)	449.236.500	970.000.000	
4.	JUMLAH Gernas Provinsi	-	5.470.717.000,-	
	Jumlah	4.677.654.558	11.209.237.000	
II. APBD				
	Jumlah	27.899.524.963	36.000.000.000	
	TOTAL	37.607.656.521	37.607.656.521	

ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

1. Tercapainya Target dan Realisasi Penyerapan keuangan secara seimbang dan tepat waktu

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran akan sangat mendukung dalam menunjang kinerja Dinas dalam mendukung program-program dan kegiatan yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi.

2. Terbangunnya Kawasan Perkebunan Rakyat Dalam Skala Ekonomi Yang Dapat Menjadi Penggerak Ekonomi di Sekitarnya dan Aneka Tanaman

Dalam mencapai target 1 (satu) juta ha tanaman kelapa sawit yang didalamnya ada pembebanan anggaran dari APBD Provinsi seluas 10.000 ha dimana sampai dengan Tahun 2008 telah direalisasi seluas 4.000 ha adapun kekurangannya akan direalisasikan bertahap sampai dengan Tahun 2013 yang rata-rata per Tahun 1.200 ha. Namun dalam kenyataannya sampai dengan Tahun 2010 teralokasi anggaran untuk perluasan areal kelapa sawit rata-rata 800 – 900 ha sehingga Total luas tanam sampai dengan Tahun 2010 seluas 5.375 ha, sehingga dengan kekurangan tsb harus teralokasi anggaran perluasan per Tahun 1.630 ha

Adapun untuk komoditi lainnya seperti karet, kakao dan kelapa dalam terjadi peningkatan rata – rata luas per Tahun 50 – 200 ha dengan tingkat produktifitas 1 – 7 % per tahun.

3. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) petani dan Pemandu Lapang dalam Penerapan PHT



Sampai dengan Tahun 2010 telah dilatih sejumlah petani dan petugas Lapangan dalam Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) sebanyak 230 orang dengan beberapa bidang Ilmu dan Pengetahuan yang berbeda seperti SL-PHT lada, Kakao, Kelapa sawit dan Karet yang tersebar pada 9 Kabupaten.

4. Memfasilitasi ketersediaan kebutuhan bahan tanaman komoditi unggulan perkebunan dan meningkatnya penggunaan sarana produksi dan alat mesin pertanian

Sampai dengan Tahun 2010 telah dibentuk kurang lebih 10 waralaba benih khusus kelapa sawit yang melakukan kemitraan dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, dan 4 waralaba benih yang bermitra dengan Pusat Penelitian Karet (RC Getas) Salatiga yang kesemuanya tersebar pada Kab. Pasir, Balikpapan, Kutai Kertanegara dan Kutai Timur.

Sedangkan untuk petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida serta Pelatihan alat dan mesin perkebunan telah dilakukan pelatihan Penyedik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Mega Mendung yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang berkerjasama dengan Direktorat Kriminal (Reskrim) Polri, yang sampai Tahun 2010 telah dilatih sebanyak 7 orang dan petugas alat mesin perkebunan sebanyak 4 orang di Balai Latihan Kerja Alat dan Mesin Pertanian (BLK) Solo

5. Meningkatnya pembangunan kebun pola Kemitraan Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan koperasi dan pola non mitra serta meningkatnya kelas kebun PBS dan mutu Hasil olahan perkebunan sesuai standar

Mengkoordinasikan TRIPARTI antara Perusahaan Besar Perkebunan, Petani Pekebun dan Pemerintah yang saling menguntungkan pada 13 Kab/Kota, dimana telah dibentuk Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) bagi komoditi kelapa sawit yang secara rutin setiap bulan membahas harga TBS

Melakukan penilaian klasifikasi kebun yang tujuannya untuk mengetahui tingkat kinerja Perusahaan Perkebunan dalam mengelola Kebun yang pada gilirannya nanti akan dimasukkan dalam kategori kurang baik, baik dan sangat baik.

6. Terawasinya ketersediaan benih yang dihasilkan sumber benih

Terlatihnya pengawas benih dan penangkar benih di 14 Kab/kota sebanyak 30 orang yang tugasnya mengawasan peredaran benih dan sertifikasi pengujian benih perkebunan serta penanganan kasus benih illegal (Palsu) yang beredar dimasyarakat sesuai dengan UU No 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dan PP 44 Tahun 1995 tentang perbenihan serta Permentan No. 39 Tahun 2006 tentang Produksi, sertifikasi dan peredaran benih bina

Pengawasan peredaran dilakukan untuk mengawasi agar bibit atau benih tanaman perkebunan yang beredar di masyarakat memang benih bina, benih unggul dari sumber benih resmi yang ditunjuk dan diakui oleh pemerintah





serta dilengkapi dengan dokumen penyerta dari pihak yang berwenang. Dengan demikian maka dapat dicegah dan dihindari adanya peredaran benih ilegal yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dapat merugikan petani atau pihak pengguna benih tanaman perkebunan serta diharapkan pula tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan benih bermutu dalam usaha budidaya perkebunan

7. Melaksanakan uji terap teknologi dan uji penerapan OPT

Terlatihnya tenaga pengamat Hama Penyakit dan Gulma sebanyak 30 orang se Kab/Kota se Kaltim untuk mendukung dalam rangka pengamatan OPT yang ada di wilayah kerja masing Kab/Kota sehingga terdeteksinya serang Hama Penyakit dan Gulma pada tanaman perkebunan terutama tanaman yang diusahakan masyarakat pekebun dengan prinsip menggunakan metode 4 prinsip PHT yaitu Penggunaan benih unggul mutu, Pengamatan secara rutin, Terkendalinya dengan memanfaatkan musuh alami OPT dan Petani ahli PHT

8. Melaksanakan pemeliharaan kebun induk kelapa kopyor, kebun induk lada dan aren serta pengembangan kebun induk aren

Pembangunan kebun induk lada 2 ha, aren 1 ha dan kelapa kopyor 1 ha dilaksanakan di Kab. Kutai kertanegara dengan maksud sebagai bahan tanaman (benih / bibit) tanaman tersebut dan sebelum disebarkan dimasyarakat harus dilakukan sertifikasi oleh Pusat penelitian rempah.



Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet pola PIR Swadaya di wilayah Kalimantan Timur tahun 2009 mengalami berbagai kendala, hambatan dan permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis, adapun tantangan dan permasalahan yang ditemui dalam pengembangan perkebunan rakyat terutama kelapa sawit rakyat Pola PIR Swadaya adalah sebagai berikut :

1. Terlambatnya penyiapan bibit kelapa sawit maupun karet oleh rekanan baik untuk anggaran APBD murni maupun APBD Perubahan yang disebabkan oleh adanya ketergantungan bibit dari luar daerah, sedangkan bibit sawit maupun karet yang ada di beberapa lokasi keasliannya diragukan karena tidak memiliki dokumen asli dari sumber yang ditunjuk pemerintah, sedangkan penangkar-penangkar bibit binaan Dinas Perkebunan saat ini masih dalam tahap pengembangan dan pemeliharaan bibit kelapa sawit maupun karet.
2. Kemampuan teknis budidaya, wirausaha dan manajemen petani masih rendah. Hal ini disebabkan karena lokasi pengembangan yang terpilih masih merupakan wilayah yang baru dibuka yang selama ini usahanya bukan tanaman kelapa sawit.
3. Seleksi dan penetapan CPCL pada wilayah pengembangan baru dilakukan oleh petugas Lapangan mengalami keterlambatan karena sosialisasi ke masyarakat harus dilaksanakan berulang kali untuk memastikan lahan-lahan kebun adalah milik masyarakat, tidak tumpang tindih dan lahannya dalam satu hamparan.
4. Para Petugas Lapangan (PPL) Swadaya dan tahapan-tahapan pengembangannya sehingga sebagian petani peserta belum sepenuhnya paham dengan program.
5. Dalam distribusi bantuan petani masih belum disertai dengan pendampingan yang maksimal melalui konsep pola pemberdayaan petani (sistem kebersamaan ekonomi) sehingga dikhawatirkan pengelolaan bantuan oleh petani belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





B. Solusi

1. Pengembangan kapasitas dan kesiapan penangkar- penagkar bibit lokal yang dengan lokasi pengembangan sehingga di dalam penyiapan bibit kelapa sawit dan karet diharapkan pihak ketiga dapat membeli dari penangkar penagkar tersebut.
2. Perencanaan penyiapan bibit tanaman kelapa sawit dan karet dilapangan disesuaikan dengan kebutuhan bibit untuk pengembangan setiap bulan.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani melalui pelatihan pelatihan dan kunjungan belajar untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen kelompok tani kelapa sawit dan karet sehingga dilapangan terlaksana dengan baik.
4. Usulan calon petani dan calon lahan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat dari Dinas Perkebunan Kabupaten.
5. Peningkatan kemampuan petugas lapangan (PPL) melalui pembinaan dan pelatihan, pertemuan-pertemuan teknis PIR Swadaya.
6. Mekanisme penyusunan anggaran selalu dihadiri oleh instansi yang membidangi panggar eksekutif dan komisi legislatif bersama dengan yang mengajukan anggaran baik secara formal maupun informal.
7. Setiap pemberian bantuan petani agar selalu disertai dengan pelatihan dan pendampingan manajemen kelompok (sistim pengelolaan bantuan yang diterima)





C. Akuntabilitas Keuangan

Aktivitas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan dan mendukung Rencana Strategik (RENSTRA) tidak terlepas dari penganggaran (budgeting), karena dengan dukungan penganggaran yang baik akan dapat mengimplementasikan Rencana Kerja (Renja). Dukungan anggaran yang diterima Dinas Perkebunan Provinsi pada tahun 2010 berasal dari dana APBN / Dekonsentrasi dan APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan total anggaran sebesar Rp. **56.657.776.000** ,- dan terserap sebesar Rp. **47.820.456.717**,- dengan rincian :

1. Dana APBN sebesar Rp. 15.208.587.000 terserap Rp. 12.790.350.915 dengan prosentase fisik sebesar 89,40 %
2. Dana APBD sebesar Rp. 41.449.189.000 terserap Rp. 35.030.105.802 dengan prosentase fisik sebesar 88,00 %





BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2010. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)* ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)* berdasarkan penetapan indikator kegiatan yang dituangkan dalam formulir Penetapan Kinerja (PK) dengan prosentase capaian kinerja sebesar **88,70 %**.

A. Kesimpulan

Salah satu faktor pendukung penentu sukses dan tidaknya pelaksanaan kegiatan pengembangan 1 juta ha adalah faktor pendanaan. Jumlah anggaran yang diperoleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan baik dalam rangka pembinaan, pemeliharaan maupun pembukaan kebun baru.

Dari seluruh pencapaian program kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sepanjang Tahun 2010 dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur masih belum sepenuhnya merefleksikan dan sesuai dengan perencanaan jangka menengah (RKPD dan Renja SKPD), sehingga realisasi program/kegiatan belum dapat dicapai secara optimal.

B. Saran

Untuk peningkatan pencapaian hasil kegiatan dari program yang ada di tahun-tahun berikutnya disarankan agar pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur hendaknya disesuaikan





dengan perencanaan sebelumnya, sehingga realisasi kegiatan dapat dicapai secara optimal. Kegiatan yang tidak terprogram hendaknya terkoordinasi dengan baik antara unit-unit kerja terkait, sehingga tidak membebani anggaran belanja secara signifikan yang berakibat kepada penggeseran anggaran atau kegiatan.

